

Acc  
25/124  
09

# EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN KOMPONEN PENDIDIKAN DI KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN

Aisyiah Nur Handayani<sup>1</sup>, R. Slamet Santoso<sup>2</sup>, Hardi Warsono<sup>3</sup>

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50275 Telepon (024)  
7465407/ Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/> Surel: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRAK

Beragam kebijakan yang dicetuskan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya program kesejahteraan sosial serta menekan kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat melalui Program Keluarga Harapan diberlakukan sejak tahun 2007. PKH di Kecamatan Pulokulon diterapkan tahun 2014 program penanggulangan kemiskinan salah satunya komponen pendidikan. Permasalahan yang ada terkait pendamping PKH masih belum memadai, terbatasnya pemahaman KPM tentang PKH, partisipasi anak-anak penerima PKH di jenjang pendidikan masih rendah, KPM yang ketergantungan terhadap bantuan PKH, sarana dan prasarana pelaksanaan penunjang kegiatan PKH belum memadai. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan evaluasi PKH komponen pendidikan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan PKH di Kecamatan Pulokulon. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi William Dunn efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan serta teori hambatan pelaksanaan PKH dari Rachma Maulida. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari indikator evaluasi secara keseluruhan sudah memenuhi yaitu responsivitas dan ketepatan meskipun masih mendapat tantangan melakukan graduasi kemandirian. Sedangkan indikator lainnya masih belum memenuhi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan belum efektif secara menyeluruh. Hal ini dipengaruhi hambatan yaitu minimnya pemahaman KPM terhadap bantuan PKH, minimnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan PKH dalam pendampingan, belum memadai sumber daya manusia, keterlambatan memperbarui status kepesertaan dalam pemutakhiran data. Saran yang diberikan adalah sosialisasi kepada KPM mengenai kemandirian ekonomi serta edukasi pendidikan anak, peningkatan koordinasi dengan aparat desa informasi DTKS sehingga penyesuaian distribusi bantuan dapat mencapai pemerataan yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Evaluasi, komponen pendidikan, PKH

<sup>1</sup> Mahasiswa Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> Dosen Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro

<sup>3</sup> Dosen Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro

## PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kesejahteraan sosial yang dialami oleh semua negara di dunia tidak hanya negara berkembang melainkan juga negara maju. Pertumbuhan penduduk mempengaruhi kemiskinan dikarenakan populasi tumbuh lebih cepat dibandingkan daya tampung lapangan pekerjaan sehingga penduduk bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan terjadi saat ketidakmampuan keadaan ekonomi seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta kebutuhan lainnya yang tidak memenuhi standar kualitas hidup (Aditya Sudamardi, 2020).

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Berbagai upaya bentuk penanggulangan pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah berpedoman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Hal tersebut juga berkesinambungan dengan komitmen pemerintah dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan atau SGD's (*Sustainable Development Goals*). Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ini memberikan peluang kepada masyarakat

miskin agar meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan merupakan program yang didasari peraturan penanggulangan kemiskinan dengan memberikan program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang memenuhi komponen sebagai persyaratan untuk terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 hingga saat ini jumlah keluarga penerima manfaat PKH dan anggaran terus mengalami peningkatan terlihat pada gambar di atas. Pelaksanaan program PKH ini diterapkan secara menyeluruh di 34 provinsi yang mencakup 514 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan (Kementerian Sosial, 2021).

Berdasarkan data BPS bahwa jumlah penduduk miskin yang berada di Kabupaten Grobogan tergolong fluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin mencapai 172,26 ribu, dan pada tahun 2021 meningkat mencapai 175,72 ribu. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah.

Tabel 1. 1  
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  
PerKecamatan  
di Kabupaten Grobogan Tahun 2021 -2023

Kecamatan	Tahun					
	2021		2022		2023	
	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga
Wirosasi	49.798	20.841	49.798	20.839	49.551	20.111
Tawangharjo	30.237	12.658	30.237	12.656	30.005	12.151
Grobogan	48.420	19.371	48.421	19.371	47.699	18.568
Purwodadi	57.721	24.558	57.722	24.551	57.285	23.751
Brati	26.953	11.379	26.953	11.378	26.584	10.976
Klambu	20.926	8.665	20.926	8.664	20.958	8.483
Godong	47.044	19.345	47.045	19.345	51.712	20.186
Gubung	47.260	18.950	47.260	18.947	46.433	18.059
Tegowanu	29.783	12.674	29.783	12.675	33.207	13.179
Tanggungharjo	23.502	9.655	23.501	9.653	24.147	9.486
Kedungjati	35.160	13.366	35.160	13.366	34.825	12.769
Karangayung	49.266	19.459	49.266	19.458	50.170	19.596
Penawangan	37.098	14.824	37.098	14.821	37.569	14.598
Toroh	56.581	23.277	56.581	23.275	57.377	23.336
Geyer	49.669	19.049	49.669	19.046	50.476	18.928
Pulokulon	68.387	26.262	68.387	26.258	67.572	25.289
Kradenan	43.655	17.319	43.655	17.318	43.555	16.917
Gabus	40.335	16.865	40.335	16.865	39.808	16.291
Ngaringan	45.500	18.517	45.500	18.515	44.936	17.934

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, 2024

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PPID Kota Semarang, 2023). DTKS ini menjadi data acuan dalam program penanganan fakir miskin serta penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pada data tabel 1.1 tersebut bahwa kecamatan yang memiliki jumlah DTKS posisi tertinggi setiap tahunnya yaitu Kecamatan Pulokulon dengan jumlah KK 26,262 terdapat jumlah warga 68,387 tahun 2021, pada tahun 2022 jumlah KK 26,258 terdapat jumlah warga 68,387 warga, sedangkan pada tahun 2023 jumlah KK 25,289 terdapat jumlah warga 67,572.

Tabel 1. 2  
Data Non PKH dan KPM PKH Komponen  
Pendidikan di Kecamatan Pulokulon  
Tahun 2021-2022

Desa	Tahun 2021		2022	
	Jumlah		Jumlah	
	Non PKH	KPM	Non PKH	KPM
Jambon	601	434	1240	414
Jatiharjo	487	223	1250	197
Jetaksari	425	282	931	241
Karangharjo	858	500	1528	483
Mangunrejo	722	314	1228	292
Mlowokarangtalun	550	332	1087	321
Panunggalan	932	350	1645	315
Pojok	884	549	1462	524
Pulokulon	859	501	1626	463
Randurejo	438	226	921	222
Sembungharjo	833	453	1340	412
Sidorejo	934	479	1889	465
Tuko	960	390	1848	362

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, 2024

Keluarga penerima manfaat merupakan penerima bantuan syarat tunai PKH. Berdasarkan data tersebut partisipasi anak penerima PKH komponen Pendidikan di Kecamatan Pulokulon yang mengenyam pendidikan masih rendah, mayoritas menempuh jenjang SD/Sederajat sedangkan jenjang SMP dan SMA/Sederajat masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada kualitas sumber daya pengetahuan serta daya saing yang dimiliki sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan di masa

mendatang. Masih banyak non PKH komponen pendidikan yang belum menerima bantuan PKH. Mengenai bantuan PKH ini menjadi perhatian bagi Pemerintah daerah setempat agar tanggap terhadap aspirasi warga untuk dapat melakukan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur Program Keluarga Harapan sehingga dapat membantu kesejahteraan sosial warga.

Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat PKH di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan banyak warga yang belum memahami bantuan PKH di data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditinjau oleh desa/kelurahan setempat. Sebagaimana ada warga yang sesuai komponen PKH belum masuk dalam kategori penerima keluarga manfaat PKH maka dapat berkoordinasi ke desa agar dimasukkan ke DTKS. Sehubungan dengan penelitian terdahulu (Rachma Maulida, 2022) bahwa masih rendahnya partisipasi dan pemahaman pola pikir keluarga penerima manfaat mengenai program bantuan keluarga harapan karena pendamping PKH yang diperlakukan kurang baik oleh orang tua, dianggap menggurui pada saat memberikan audiensi. Penelitian lain oleh (Oktarina Vivi, 2022) bahwa kurangnya sosialisasi mengenai program keluarga harapan sehingga banyak warga miskin belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial baik non KPM

maupun calon KPM.

Jumlah pendamping PKH Kabupaten Grobogan semakin berkurang setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah pendamping di Kecamatan Pulokulon mencapai 20 orang, dan tahun 2020 mencapai 20 orang. Peran pendamping sangat penting dalam program Keluarga Harapan akan tetapi masih terdapat ketimpangan dalam beban kerja untuk mendampingi para KPM PKH. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Rachma Maulida, 2022) bahwa keterbatasan jumlah pendamping PKH Pendamping mempengaruhi proses keberjalanan kebijakan dikarenakan jumlah binaan setiap pendamping tidak terbagi dengan rata yang menyebabkan hambatan terbesar dalam pendampingan..

Keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan yang tepat dapat mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial yang merata terutama menempuh pendidikan yang layak terutama kebijakan Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam menilai keberhasilan kebijakan program keluarga harapan sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Keluarga Harapan Komponen Pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan”.

## **KERANGKA TEORI**

### **Administrasi Publik**

Administrasi publik yang dikemukakan oleh Chandle dan Plano dalam (Pasolong, 2014) adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut pandangan lain oleh Nicholas Henry dalam (Keban, 2014) bahwa administrasi publik merupakan suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman tentang pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

### **Kebijakan Publik**

Menurut Woll dalam (Sawir, 2021) mengemukakan kebijakan publik merupakan sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung dan melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R. Dye dalam (Pasolong, 2014) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dikerjakan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan tindakan

sejumlah aktor pemerintah untuk mengatasi masalah dengan tujuan perubahan yang diinginkan seringkali sifatnya mengikat publik. Menurut Chandler dan Plano dalam (Keban, 2014) mendefinisikan kebijakan publik adalah strategi pemanfaatan sumber daya yang ada dengan tujuan memecahkan masalah publik.

### **Evaluasi Kebijakan**

Anderson dalam (Budi Winarno, 2007) mengemukakan bahwa evaluasi sebagai proses dalam menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan mendukung tercapainya tujuan kebijakan.

Menurut William Dunn dalam (Leo Agustino, 2016) secara umum bahwa evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai serta manfaat dari hasil kebijakan. Menurut William Dunn (2003) dalam (Subarsono, 2011) suatu kebijakan berhasil atau gagal dinilai dari indikator evaluasi yaitu

- a. Efektivitas berkaitan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dari suatu tindakan. Ukuran efektivitas merupakan standar terpenuhinya sasaran dan tujuan yang dicapai. Setelah pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampaknya mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi berhasil atau gagal, suatu kebijakan publik hasilnya tidak

langsung efektif dalam jangka pendek namun setelah melalui proses tertentu.

- b. Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan dalam mencapai tujuan kebijakan tertentu. Kebijakan yang mencapai efektivitas dengan biaya terkecil disebut dengan efisien.
- c. Kecukupan merupakan seberapa jauh tujuan yang telah dicapai dalam memecahkan masalah. Kriteria ini berkenaan dengan efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan dalam memecahkan masalah yang terjadi.
- d. Pemerataan berhubungan dengan keadilan yang menunjuk pada distribusi dan manfaat kepada sasaran kebijakan.
- e. Responsivitas berhubungan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi dan nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dilihat melalui tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan dapat dirasakan dalam bentuk dukungan atau penolakan.
- f. Ketepatan merupakan kriteria yang berhubungan dengan rasionalitas dari manfaat suatu kebijakan. Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program.

Menurut (Rachma Maulida, 2022) terdapat hambatan yang berpengaruh dalam kebijakan program keluarga harapan yaitu hambatan

internal berkaitan dengan faktor yang berasal dari dalam pelaksanaan kebijakan dan hambatan eksternal berkaitan dengan faktor yang berasal dari keragaman kelompok sasaran serta luar lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Situs penelitian ini adalah di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan menempati posisi pertama dengan jumlah penerima bantuan PKH terbanyak di antara 19 kecamatan lainnya. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan yang memahami fokus penelitian diteliti, terlibat, serta berperan langsung dalam kebijakan program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan diantaranya informan di tingkat pemerintah daerah kabupaten yaitu kepala bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, koordinator PKH Kabupaten Grobogan, serta informan ditingkat kecamatan yang memahami kondisi PKH yaitu koordinator PKH Kecamatan Pulokulon, pendamping sosial PKH Kecamatan Pulokulon, dan informan selanjutnya masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH komponen pendidikan yang merasakan bantuan program keluarga harapan, serta informan dari perangkat desa setempat. Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Program Keluarga Harapan Komponen Pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan**

Evaluasi bertujuan menemukan informasi yang berhubungan dengan hasil suatu kebijakan sehingga dapat menilai manfaat yang diperoleh. Evaluasi kebijakan menurut William Dunn dalam (Subarsono, 2011) adalah menilai sejauh mana keberhasilan kebijakan yang telah dibuat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan berdasarkan pada indikator efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Untuk itu digunakan kriteria evaluasi dari William Dunn, sebagai berikut:

#### **1. Efektivitas**

##### **a. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan pendidikan**

Tujuan PKH komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon yang berlangsung taraf hidup pendidikan tingkat pendidikan KPM PKH yang rata-rata lulusan SD menciptakan pola pikir dan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan masih rendah, sehingga mereka tidak mengutamakan pendidikan anak. Biasanya KPM menyekolahkan anaknya ada yang hingga jenjang SD atau SMP saja. Pola asuh KPM

PKH terhadap pendidikan anaknya yang belum optimal karena latar belakang orang tua yang hanya lulusan SD, bekerja sebagai buruh tani dan serabutan. Sejalan dengan temuan penelitian oleh Jaelani et al. (2022) terdapat temuan bahwa KPM belum sepenuhnya baik memperhatikan kebutuhan pendidikan anak di Desa Kadugenep Kabupaten Serang. Pola asuh KPM PKH terhadap pendidikan anaknya yang belum optimal karena latar belakang orang tua yang hanya lulusan SD, bekerja sebagai buruh tani dan serabutan. kewajiban KPM sebagai orang tua diminta untuk menggunakan uang bantuan PKH semestinya dimanfaatkan keperluan pendidikan anak, seperti SPP dan buku paket serta uang saku. Anak diharapkan hadir di sekolah 85% pada hari efektif pembelajaran. Namun, hambatannya masih terdapat pola asuh belum maksimal menunjukkan bahwa komitmen KPM PKH terhadap pendidikan anak belum sepenuhnya baik

##### **b. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat**

Tujuan PKH dapat mengubah pola pikir KPM ke arah yang lebih baik dan kemandirian masih sulit untuk dapat tercapai. Selaras dengan temuan dari penelitian Kurniawan Ade (2021) yang mengatakan masih banyak KPM yang tidak ingin mencopot statusnya sebagai penerima bantuan PKH karena masih ketergantungan

dengan bantuan PKH tersebut serta ingin menerima bantuan secara berkala. Penemuan di lapangan mencatat adanya pergeseran positif dalam cara pandang KPM, meskipun perubahan tersebut terjadi secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa PKH memiliki potensi untuk memfasilitasi peningkatan kesadaran dan pemahaman KPM mengenai pentingnya kemandirian

#### **c. Mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin**

Program ini efektif dalam mengurangi beban pengeluaran, perlu ada pengembangan lebih lanjut untuk mendorong peningkatan pendapatan dan mengurangi ketergantungan. Sejalan dengan temuan penelitian Nurrohmah & Rahaju (2019) bahwa kebijakan PKH mampu mengurangi beban pengeluaran sehingga merasakan keringanan biaya pendidikan. Akan tetapi peneliti menemukan bantuan PKH belum dapat meningkatkan pendapatan karena KPM masih bergantung kepada bantuan PKH sehingga menjadi hambatan pendamping dalam melakukan graduasi. Ketergantungan KPM pada bantuan PKH mengindikasikan bahwa meskipun mereka mendapatkan keringanan biaya, mereka belum beranjak dari status sebagai penerima bantuan. Hal ini menciptakan hambatan dalam proses graduasi yang seharusnya menjadi langkah untuk mengarahkan KPM menuju kemandirian.

Penyesuaian ini sangat penting agar tujuan PKH dalam menciptakan kemandirian ekonomi bagi KPM dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

#### **d. Mengurangi kemiskinan maupun kesenjangan**

Tujuan dari diadakannya PKH yang ditemukan peneliti bahwa dapat mengurangi kemiskinan dikarenakan dana yang dicairkan digunakan untuk biaya pendidikan anak. masih terjadi kesenjangan sosial sesuai yang belum dapat mengurangi kesenjangan karena KPM yang semakin meningkat jumlahnya (Juniar Trifandy, 2023). Terdapat penurunan kemiskinan yang dihasilkan oleh program ini, peningkatan jumlah KPM menunjukkan adanya masalah struktural yang lebih luas dalam sistem sosial-ekonomi. PKH telah menunjukkan potensi dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan, tantangan dalam mengatasi kesenjangan sosial tetap perlu diperhatikan

#### **e. Pengenalan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM**

Masih kurangnya pemahaman KPM terkait dengan keuangan elektronik karena akses internet yang belum memadai. Penggunaan keuangan elektronik menjadi semakin penting dalam era digital. Namun, pemahaman yang rendah tentang keuangan elektronik di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menghambat manfaat yang seharusnya diperoleh dari teknologi ini.



Tanpa pemahaman yang memadai, KPM berisiko menghadapi penipuan atau kesalahan dalam transaksi, yang dapat merugikan mereka secara finansial

## **2. Efisiensi**

### **a. Sumber daya fasilitas**

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di dalamnya memiliki misi mengupayakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Fakta yang peneliti temukan di lapangan masih terjadi ketimpangan fasilitas pendidikan di Kecamatan Pulokulon. Pembangunan infrastruktur fasilitas pendidikan yang belum merata disebabkan karena letak geografis wilayah Kecamatan Pulokulon didominasi oleh hutan dan tanahnya kaya akan kapur putih. Sama halnya dengan penelitian terdahulu oleh Sari Gita (2019) temuan bahwa belum menyebar merata fasilitas pendidikan di Kecamatan Semarang Utara. Letak pemukiman yang ada saling berjauhan dan membawa dampak fasilitas pendidikan serta akses jalan belum baik.

### **b. Pendamping PKH**

Pendamping PKH yang ada pada Kecamatan Pulokulon belum optimal. Kondisi ini didasari oleh jumlah pendamping dengan KPM yang ditanggung sangatlah jauh dari kata cukup. Perihal kualitas SDM pendamping PKH dapat dikatakan sudah

memadai, dikarenakan adanya persyaratan rekrutmen pendamping yang ketat. Untuk mencapai kata efektif, jumlah KPM minimal 150 orang dan maksimal 300 orang untuk tiap desa, tetapi kenyataan di lapangan melebihi kapasitas tersebut sehingga dapat dikatakan belum memadai. jumlah pendamping dalam Kecamatan Pulokulon berjumlah 22 orang terdiri dari 3 orang lulusan S2, 18 orang lulusan S1, serta 1 orang lulusan D3. Dalam aspek tersebut didapati adanya keterbatasan jumlah pendamping PKH di Kecamatan Pulokulon, karena 350 KPM didampingi oleh satu pendamping yang seharusnya pendamping hanya perlu mendampingi 150-300 KPM saja sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rachma Maulida (2022) temuan masih kurangnya jumlah pendamping PKH, sama halnya ditemukan oleh penelitian Kurniawan Ade (2021) bahwa kurangnya sumber daya pendamping hanya terdapat 16 pendamping karena faktanya pendamping mendampingi 200-400KPM. Idealnya pendamping PKH mendampingi sekitar 150-300 keluarga penerima manfaat, tetapi di lapangan melebihi kapasitas tersebut. Terdapat 22 pendamping PKH di Kecamatan Pulokulon dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Menurut Santoso dalam(Yanti et al., 2020) bahwa pelatihan merupakan kegiatan yang dirancang bertujuan peningkatan pengetahuan, keahlian dan pengalaman individu. Pelatihan yang

diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada keluarga penerima manfaat dengan bimbingan teknis dan modul lengkap.

**c. Sumber daya anggaran**

Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pulokulon, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tingkat penyaluran yang mencapai 90% menunjukkan kinerja relatif baik dalam distribusi dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, keberadaan 10% dana yang tidak tersalurkan mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program. Faktor kematian KPM dan ketidaksesuaian data identitas, seperti nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), menyoroti pentingnya validasi dan pemeliharaan data penerima manfaat untuk mengoptimalkan penyaluran dana. Pengembalian dana yang tidak tersalurkan ke kas negara untuk pembaruan data menunjukkan responsibilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

**3. Kecukupan**

**a. KPM PKH tercukupi kebutuhannya**

Besaran bantuan yang diterima oleh KPM dinilai dari tercukupinya pemenuhan kebutuhan KPM masih belum cukup optimal karena bantuan ini sifatnya hanya membantu dan dicukupkan dari segi pendidikan anak sekolah terlebih lagi kebutuhan yang di keluarkan KPM berbeda-beda. Sejalan

dengan pernyataan Ayu Nurandani & Utoyo Sutiyoso (2022) bahwa dilihat dari nominal bantuan tidak mencukupi namun KPM berupaya mencukupkan pengeluaran dengan hemat.

Tabel 1. 3  
Jumlah dana bantuan PKH  
bagi komponen pendidikan

Kategori	Jumlah Dana Bantuan
SD/Sederajat	Rp 900.000
SMP/Sederajat	Rp 1.500.000
SMA/Sederajat	Rp 2.000.000

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, 2023

KPM berusaha mengelola pengeluaran dengan hemat. Perbedaan itu tergantung pada jumlah komponen bantuan PKH dalam satu Kartu Keluarga serta bagaimana KPM memanfaatkan bantuan PKH.

**b. Pendampingan KPM PKH melalui kegiatan P2K2**

Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sudah berjalan dengan baik dari segi penyampaian materi dari pendamping kepada KPM PKH komponen pendidikan sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2021-2024. Setiap Pendamping PKH mempunyai ciri khas dalam menyampaikan materi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan *sharing* informasi terbaru kepada KPM sehingga situasi dalam kegiatan P2K2 tidak terlalu

kaku. Hambatan yang ditemui dalam kegiatan P2K2 adalah masih rendahnya pemahaman KPM terhadap materi yang disampaikan oleh pendamping PKH

#### **4. Pemerataan**

##### **a. Pemerataan bantuan PKH yang diberikan**

Sosialisasi awal dilakukan dengan pemaparan materi seperti pengertian bantuan PKH, syarat menjadi anggota KPM PKH, hak dan kewajiban sebagai anggota KPM PKH, serta sanksi yang diberikan jika melanggar aturan PKH (Kementerian Sosial, 2021) Hambatan saat pendamping verifikasi di lapangan yaitu nama warga yang tidak sesuai dengan nama asli pada Kartu Keluarga (KK), dan ada masyarakat yang terdaftar sebagai KPM PKH yang sedang melakukan pekerjaan bertani, jarak antar rumah masyarakat jauh yang menjadi hambatan bagi pendamping untuk mencari nama KPM sesuai dengan KTP karena nama panggilan menggunakan nama anak. Belum merata bantuan PKH bagi warga miskin karena tolak ukur kemiskinan yang bersifat ambigu sehingga membuat bingung pihak terkait. Kondisi kemiskinan yang ada pada setiap desa memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Penelitian lain oleh Nurrohmah & Rahaju (2019) belum merata bantuan PKH di lapangan karena ketidaksesuaian data. Pada penelitian ini belum merata bantuan PKH bagi warga miskin karena tolak ukur kemiskinan yang

bersifat ambigu sehingga membuat bingung pihak terkait. Kondisi kemiskinan yang ada pada setiap desa memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin tentang kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan.

##### **b. Pemberitahuan pencairan dana bantuan KPM PKH**

Pemberitahuan bantuan PKH kepada KPM PKH komponen pendidikan berjalan dengan baik dari setiap pendamping PKH mempunyai cara berbeda-beda dalam memberitahukan informasi karena pendamping mengetahui karakteristik KPM PKH yang mereka dampingi. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, penyampaian informasi mengenai pemberitahuan pencairan dana bantuan PKH di Kecamatan Pulokulon berbeda-beda. Dalam hal ini, pendamping memiliki caranya masing-masing untuk memberitahu informasi tersebut

#### **5. Responsivitas**

##### **a. Tanggapan dari KPM**

KPM PKH merasakan perubahan dengan PKH dapat meringankan kebutuhan pendidikan KPM PKH komponen pendidikan dibandingkan sebelum dilaksanakannya PKH. Harapan dari KPM PKH menginginkan bantuan PKH dapat berjalan jangka waktu panjang, bantuan dapat ditingkatkan dari sisi nominal, dan para pendamping PKH selalu

konsisten dalam menjalankan tugasnya.

### **b. Tanggapan dari pelaksana terhadap PKH**

Tanggapan pelaksana PKH dalam mencapai suatu target capaian bahwa pendamping PKH mempunyai tantangan dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sebagai upaya mencapai suatu tujuan yaitu merubah pola pikir KPM walau secara perlahan. Selaras dengan pernyataan penelitian dari Ayu Nurandani & Utoyo Sutiyoso (2022) bahwa masih belum dapat merubah pola pikir KPM terhadap graduasi karena sebagian besar masih menggantungkan harapan kepada bantuan PKH. Tanggapan pelaksana kebijakan terhadap pencapaian PKH selalu berusaha untuk tetap bertanggungjawab mengkoordinasikan aktivitas KPM PKH. Handoko (dalam Holijah, 2021) bahwa koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Sejalan dengan temuan penelitian oleh Amalia & Rachmatullah Putra (2023) yang mengatakan koordinasi dan komunikasi yang terjalin pendamping dalam melaporkan pelaksanaan PKH dengan Dinas sosial menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pendamping PKH menghadapi tantangan untuk mengubah persepsi KPM mengenai kemandirian finansial.

## **6. Ketepatan**

### **a. Ketepatan manfaat PKH**

Program keluarga harapan ini menyokong biaya pendidikan KPM komponen pendidikan juga menambah pengetahuan dalam mengikuti kegiatan P2K2. Selain itum memberikan manfaat pentingnya pengetahuan dari materi yang disampaikan pendamping seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, terutama bagi KPM komponen pendidikan mengenai pola asuh orangtua terhadap pendidikan anak. Sejalan dengan penelitian oleh Kurniawan Ade (2021) bahwa pelaksanaan kebijakan PKH bermanfaat bagi KPM dapat meringankan beban ekonomi. Hambatan yaitu masih ada keterbatasan biaya sehingga KPM tidak mampu menyekolahkan anaknya hingga jenjang SMA

### **b. Dampak PKH**

Dampak positif PKH dapat menekan biaya pengeluaran KPM karena dapat menunjang perekonomian baik dari aspek pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pemberian bantuan PKH berdampak positif mengurangi beban pengeluaran KPM dalam memfasilitasi anaknya untuk bersekolah (Setyawardani et al., 2020). Di sisi lain, terdapat juga dampak negatif seperti ketergantungan KPM terhadap bantuan PKH, dan penyalahgunaan uang bantuan yang digunakan untuk membayar pinjaman pribadi.

## **Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Komponen Pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan**

### **a. Hambatan internal**

Pendataan DTKS yang dulunya dilakukan dengan kuesioner namun keterbatasan sumber daya manusia perangkat desa belum memadai, sehingga saat ini digunakan sistem SIKS-NG yang dapat diakses selama 24 jam. Aparat desa berhak mengusulkan warga yang miskin ke dalam DTKS, meskipun hal ini keputusannya ditentukan Pemerintah Pusat, sehingga bagi mereka yang berstatus ekonomi rendah juga dapat menerima bantuan. Hambatan jaringan yang tidak stabil menyebabkan server yang lambat. Pemutakhiran data dilakukan setiap bulan oleh pendamping PKH melalui SIKS-NG. Namun, masih terdapat hambatan yaitu data kependudukan yang tidak diperbarui, menunggu akta kematian ketika peserta PKH dinyatakan meninggal dunia, dan *human error* yang menyebabkan kelalaian dalam pemutakhiran data

### **b. Hambatan eksternal**

Keikutsertaan KPM dalam kegiatan PKH berjalan berkat peran pendamping yang selalu memperhatikan KPM. Namun, pemahaman KPM mengenai PKH masih kurang karena mereka memaknai bahwa bantuan PKH hanya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Pemahaman KPM

PKH dalam konteks bantuan subsidi lainnya masih perlu ditingkatkan oleh pendamping PKH. Pemahaman KPM tentang program pengurangan kemiskinan dari Kementerian Sosial masih terbatas yang disebabkan minimnya informasi terkait hakikat kebijakan PKH, bansos pangan, BPNT, maupun BPJS (Hermawati Istiana, 2020). Pendamping memahami bahwa KPM PKH harus bersabar karena sinkronisasi data membutuhkan waktu dan dapat menyebabkan telat distribusi bantuan. Penelitian lain oleh (Oktaviani & Susetyo, 2022) juga menyebutkan bahwa permasalahan keterlambatan pencairan bantuan terjadi telat informasi dari pusat ke daerah sehingga pendamping kesulitan menyampaikan keterangan tersebut kepada KPM PKH. Sarana dan prasarana belum baik karena terbatasnya jumlah alat perlengkapan bagi pendamping PKH yang disebabkan ketiadaan biaya operasional. Selaras dengan peneliti oleh Rosdiana (2020) menyebutkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PKH terbatas seperti modul dan materi P2K2, banner sehingga pendamping harus menggunakan biaya pribadi karena tidak cukupnya dana operasional. Hambatan dalam evaluasi program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan selain mencakup aspek di atas, juga mencakup aspek lainnya. Hambatan yang ditemukan pada penelitian di lapangan yaitu hambatan

administrasi kependudukan bermasalah sehingga tidak cair, susah akses jaringan sinyal dan sering mati lampu bagi KPM yang bertempat tinggal pelosok jauh dari lokasi keramaian wilayah Kecamatan di Pulokulon, tidak jarang KPM PKH melewati pertemuan yang diadakan pendamping PKH karena tuntutan pekerjaan mayoritas sebagai buruh tani, terkendala *server* jaringan menghambat proses penginputan data.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Hasil evaluasi program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan sudah berjalan namun masih belum menyeluruh berikut berdasarkan enam indikator diantaranya:

- a. Indikator efektivitas dilihat dari lima tujuan PKH bahwa KPM sudah dapat mengakses layanan pendidikan dalam kebutuhan sekolah membeli peralatan tulis, buku paket, bayar SPP, serta uang transportasi, meringankan beban pengeluaran, mengurangi kemiskinan. Namun, masih terdapat kekurangannya yaitu komitmen KPM PKH belum sepenuhnya optimal pentingnya edukasi pendidikan anak, KPM masih bergantung pada bantuan PKH sehingga tidak mencapai kemandirian, tidak dapat meningkatkan pendapatan, masih adanya kesenjangan sosial

memicu kecemburuan, dan keterbatasan KPM dalam memahami produk jasa keuangan formal.

- b. Indikator efisiensi dilihat sumber daya fasilitas dari fasilitas pendidikan dan kondisi akses jalan belum tersebar merata. Selain itu, pendamping PKH masih belum memadai sehingga setiap pendamping mendampingi lebih dari 300 KPM. Sumber daya anggaran berasal dari APBN Pemerintah Pusat sudah teralokasi sebesar 90% akan tetapi 10% tidak tersalurkan kendala status kematian Keluarga Penerima Manfaat, perbedaan nama, dan Nomor Induk Kependudukan sehingga dana yang tidak tersalurkan tersebut akan dikembalikan ke kas negara untuk keperluan pembaruan data.
- c. Indikator kecukupan dilihat dari tercukupinya bantuan PKH bagi kebutuhan KPM pendidikan walaupun sifat bantuan hanya meringankan. Pendampingan KPM PKH melalui kegiatan P2K2 sudah dilakukan setiap bulan.
- d. Indikator pemerataan dilihat dari pemberitahuan pencairan dana bantuan PKH sudah dilakukan pendamping PKH. Namun, terdapat kekurangan bahwa bantuan PKH yang diberikan masih belum merata disebabkan perbedaan kondisi kemiskinan serta

- kearifan lokal yang ada pada desa satu dengan desa lainnya.
- e. Indikator responsivitas mengenai tanggapan dari KPM dengan adanya bantuan PKH sudah mengalami perubahan yang dirasakan. Tanggapan pelaksana PKH bahwa koordinasi sudah berjalan dengan baik antara Koordinator PKH Kabupaten Grobogan, Koordinator PKH Kecamatan Pulokulon serta Pendamping PKH. Namun, masih terdapat kekurangannya yaitu sulit merubah pola pikir kemandirian ekonomi KPM PKH sebab minimnya pemahaman KPM.
  - f. Indikator ketepatan bahwa PKH sudah memberikan manfaat kepada KPM. Dampak positif PKH yang terjadi meringankan beban pengeluaran, namun masih ditemukan dampak negatif KPM menjadi ketergantungan terhadap bantuan PKH dalam jangka waktu lama serta graduasi mandiri tidak dapat tercapai.
2. Hambatan yang memengaruhi pelaksanaan program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon terdiri dari hambatan internal dan eksternal sebagai berikut:
- a. Hambatan internal yang ditemukan yaitu menunggu akte kematian yang diperbaharui status penerima bantuan PKH memastikan bahwa pemerataan distribusi bantuan dilakukan secara adil, perangkat desa belum memadai sehingga terjadi *human error* pada aparatur desa yang tidak teliti memasukkan atau menambahkan data ke aplikasi SIKS-NG sehingga perlu pengawasan dari pendamping PKH memastikan efisiensi program.
  - b. Hambatan eksternal yaitu adanya pemahaman KPM terhadap pengertian bantuan PKH masih rendah mengakibatkan KPM tidak dapat memanfaatkan program secara optimal sebagaimana responsivitas bergantung pada masukan dari KPM, keterlambatan pencairan dana bantuan PKH disebabkan sinkronisasi data dengan waktu lama yang menyebabkan pemerataan bantuan terhambat, minimnya jumlah alat peraga maupun tidak terdapat biaya operasional bagi pendamping sehingga pendamping menggunakan biaya pribadi sendiri mengakibatkan kesenjangan dalam kualitas pendampingan tidak semua KPM mendapatkan perhatian yang sama. Temuan baru yang ditemukan pada penelitian di lapangan yaitu permasalahan administrasi kependudukan Kartu Keluarga belum diperbaharui mengakibatkan terhambatnya pemerataan dalam

penyaluran bantuan PKH, sulitnya jaringan sinyal dan sering mati lampu di lokasi pelosok jauh dari keramaian wilayah Kecamatan Pulokulon bahwa infrastruktur di daerah ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan KPM, mayoritas pekerjaan KPM petani sehingga tidak jarang KPM PKH melewatkan pertemuan yang diadakan pendamping PKH kesulitan merespon permasalahan yang dihadapi KPM, maupun terkendala *server* jaringan menghambat proses penginputan data mengakibatkan keterlambatan dalam pembaharuan data.

## **SARAN**

Hasil penelitian evaluasi program keluarga harapan komponen pendidikan di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan masih terdapat hambatan. Berikut beberapa saran yang diberikan peneliti, antara lain:

1. Saran terkait evaluasi program keluarga harapan belum baik yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi kepada KPM sebagai upaya meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan anak sekolah dan pola edukasi pembelajaran di rumah. Pemberian pemahaman intensif kepada KPM PKH tentang kemandirian ekonomi dan pembekalan pelatihan keterampilan untuk KPM memperoleh pekerjaan

yang lebih baik. Meningkatkan pendapatan keluarga dalam pelatihan pemahaman KPM tentang keuangan yaitu produk jasa keuangan formal dan cara mengelola dana di era globalisasi saat ini.

- b. Pembenahan infrastruktur fasilitas pendidikan dan akses jalan yang merata di Kecamatan Pulokulon. Peningkatan jumlah pendamping PKH agar rasio pendamping terhadap KPM lebih seimbang. Peningkatan kualitas pendamping PKH dengan pembekalan pelatihan yang tegas bertanggungjawab.
  - c. Melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan terkait alokasi anggaran bertujuan bantuan PKH mampu memenuhi kebutuhan KPM lebih optimal dan berkelanjutan
  - d. Melakukan analisis mendalam mengenai kondisi kemiskinan dan kearifan lokal di setiap desa untuk menentukan kebutuhan spesifik KPM di masing-masing wilayah sehingga penyaluran bantuan PKH dapat disesuaikan dengan keadaan setempat
  - e. Melakukan sosialisasi bertujuan meningkatkan kesadaran KPM tentang pentingnya kemandirian ekonomi yang mencakup pengelolaan keuangan pribadi dan keterampilan berwirausaha
2. Saran yang diberikan terkait hambatan internal dan eksternal pada pelaksanaan



program keluarga harapan yaitu:.

- a. Melakukan pelatihan berkala untuk aparat desa dalam penggunaan aplikasi SIKS-NG mencakup teknis pemahaman tentang pentingnya akurasi data.
  - b. Meningkatkan komunikasi antar pendamping PKH dengan perangkat desa dalam pembaharuan data KPM PKH.
  - c. Melakukan pendekatan secara intensif untuk memberikan pemahaman yang terstruktur kepada KPM di Kecamatan Pulokulon.
  - d. Mengalokasikan anggaran yang cukup bagi biaya operasional pendamping PKH dengan mencakup biaya transportasi dan alat bantu kerja.
3. Saran yang diberikan terkait penemuan baru dalam hambatan lainnya yaitu:
- a. Memberikan pemahaman terhadap KPM PKH yang mengalami permasalahan administrasi kependudukan dalam proses pencairan bantuan.
  - b. Melakukan koordinasi tentang waktu pertemuan yang diadakan oleh pendamping PKH bersama KPM PKH agar dapat tetap menghadiri agenda kegiatan P2K2.
  - c. Perbaiki terhadap fasilitas penerangan di jalan serta kemudahan akses internet secara merata.

- d. Kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk meningkatkan infrastruktur jaringan di area pedesaan, sehingga proses penginputan data tidak terganggu oleh masalah *server*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Sudamardi. (2020, January 22). *Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan*. Bappeda Provinsi NTB. <https://bappeda.ntbprov.go.id/kemiskinan-dan-kerusakan-lingkungan/>
- Amalia, S., & Rachmatullah Putra, L. (2023). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Malang (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 17(13), 81–89.
- Ayu Nurandani, M., & Utoyo Sutiyoso, B. (2022). *Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung*. 16(01), 97–106. <https://doi.org/10.37295/wp.v16i2.116>
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*.
- Hermawati Istiana, E. W. (2020). Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosio Konsepsia*, 9(3).
- Holijah. (2021). Analisis Koordinasi Layanan Pendidikan Narapidana Anak di Kota Palembang. *Jurnal Widya*, 24.
- Jaelani, A. M., Rahmatulloh, F. S., Febriyanti, I., & Cecilia, P. (2022). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kadugenep Kabupaten Serang. *Jurnal*

- Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 26–36.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7460394>
- Juniar Trifandy, L. A. (2023). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tegalsari Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 244–259.  
<https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.122>
- Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu Edisi 3. *Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kementerian Sosial. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*.  
<https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf>
- Kurniawan Ade, L. H. R. R. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. *Journal of Government and Political Studies*, 4(1).
- Leo Agustino. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Nurrohmah, I. A., & Rahaju, T. (2019). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto*. 7(7).  
<https://regional.kompas.com>
- Oktarina Vivi, N. K. C. (2022). Evaluasi Konteks Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1).
- Oktaviani, L., & Susetyo, I. B. (2022). Analisis Efektivitas Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 307–318.
- Pasolong, H. (2014). Gabungan Teori Administrasi. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- PPID Kota Semarang. (2023, January 31). *Cara Daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Semarang*. PPID Kota Semarang.
- Rachma Maulida, Y. H. L. A. (2022). Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 4(2).
- Rosdiana, F. A. E. P. (2020). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1).
- Sari Gita, A. M. A. (2019). *Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang*.
- Sawir, M. (2021). Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik. In *Ilmu Administrasi Publik* (Vol. 2).
- Setyawardani, D. T. R., Paat, C. J., & Lesawengen, L. (2020). Dampak Bantuan PKH Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Holistik*, 13(2).

Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. *Pustaka Pelajar*, 1(2).

Yanti, A. S., Bahri, S., & Amini. (2020). Bimbingan Teknis, Fasilitas dan Insentif Terhadap Kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Deli Serdang. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(2).  
<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/>